

**KONFLIK PERTANAHAN**  
**Studi Deskriptif Tentang Konflik Surat Ijin Pemakalan**  
**Tanah / Surat Ijo Di Surabaya**

**SKRIPSI**



Oleh :

Agustin Wiranti  
NIM. 070016360

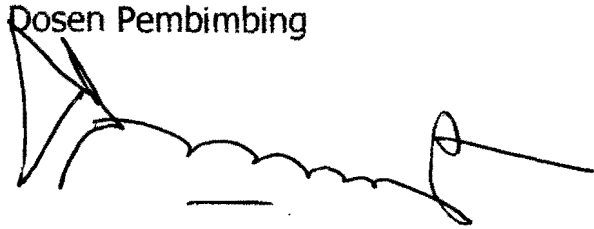
**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**SEMESTER GASAL 2004/2005**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui dan Siap untuk diujikan

Surabaya, 24 Desember 2004

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Falih Suaedi', written in a cursive style.

Dr. Falih Suaedi, M.si  
NIP. 131 801 403

## ABSTRAKSI

Penelitian ini berlatar belakang kebijakan Pemkot Surabaya yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memakai tanah yang dikuasainya, dimana hak ijin pemakaian tanah tersebut bukan sebagaimana yang diberikan dan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria. Seiring dengan bergulirnya reformasi, implementasi kebijakan ini menimbulkan konflik antara masyarakat dan Pemkot dimana surat ijo ini ditangani oleh Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah. Dasar munculnya konflik surat ijo ini dikarenakan materi perda yang mengatur masalah surat ijo yaitu Perda No. 1 Tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tanah bertentangan dengan UUPA tetapi mengacu pada PP No. 8 Tahun 1953. Sedangkan semua kebijakan masalah pertanahan seharusnya mengacu pada UUPA tahun 1960 yang lebih baru dibandingkan dengan PP tahun 1953 dan secara otomatis menghapus PP tersebut. Dasar inilah yang dipegang masyarakat untuk menuntut Pemkot agar menghapuskan surat ijo dengan membatalkan Perda tersebut. Hingga saat ini konflik tersebut belum terselesaikan bahkan cenderung mengambang tanpa penyelesaian.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana dan sudah sejauh mana proses penyelesaian konflik yang telah diterapkan sejak munculnya konflik hingga saat ini. Serta untuk mendeskripsikan aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi proses tersebut sehingga dapat menjawab rumusan permasalahan. Sedangkan permasalahan yang hendak dijawab adalah bagaimana sebenarnya proses penyelesaian konflik yang telah diterapkan selama menimbulkan polemik tentang terjadinya *dead lock* dalam perundingan antara masyarakat dan Pemkot yang berujung pada munculnya wacana akan dibawanya konflik ini ke pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah sebuah studi deskriptif dengan konflik surat ijo sebagai bahan kajiannya. Penelitian deskriptif ini berlokasi di Pemkot Surabaya. Sasaran penelitian ditentukan dengan cara *purposive* yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan konflik surat ijo ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara berstruktur baik dengan aparat Pemkot maupun dengan masyarakat pemegang surat ijo, wawancara unsur panitia perkumpulan masyarakat pemegang surat ijo dan penelaahan dokumen. *Snowball* dimungkinkan dalam rangka memperoleh data yang lebih mendalam. Untuk memperoleh keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber data dengan menggunakan berbagai sumber yang berbeda. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif mengikuti alur siklus dimana analisis dilakukan secara bersamaan, jalin-menjalin pada tahapan reduksi, penyajian serta verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian konflik telah melalui beberapa proses yang hingga saat ini belum selesai. Hal itu disebabkan adanya beberapa kendala baik dari pihak masyarakat maupun dari Pemkot. Dari masyarakat berupa pengerahan massa oleh oknum-oknum tertentu yang secara tidak langsung melanggar kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh perwakilan masyarakat dengan Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah. Sedangkan dari pihak Pemkot adalah adanya keputusan dari Walikota untuk meminta pertimbangan dari BPN Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya.